

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aliyah, S. dan Nahar, A. (2013). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jepara. *Jurnal Akuntansi & Auditing*. Volume 8
- Carpenter, V. L. dan Feroz, E. H. (2001). Institutional Theory and Accounting Rule Choice: An Analysis of Four Us State Government Decisions to Adopt Generally Accepted Accounting Principles. *Accounting Organizations and Society*
- Deegan, C. (2007). *Financial Accounting Theory* 2nd. Melbourne: McGraw Hill Australia Pty Limited.
- Fard, H. D. dan Romstamy, A. A. (2007). Promoting Public Trust in Public Organization: Explaining the Role of Public Accountability. *Public Organiz Review*.
- Falkman, P. dan Taggeson, T. (2008). Accrual Accounting does not Necessarily Mean Accrual Accounting: Factors that counteract compliance with accounting standars in Swedish Municipal Accounting. *Scandinavian Journal of Management*.
- Firmansyah & Mochklas, (2020). *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika
- Hood, C. (2001). Transparency, in:
- Grosso, A. L. dan Gregg, G. V. (2011). How Citizens View Governmen Performance Reporting. *Public Performance & Management Review*.
- Hadisantoso, Erwin, and Fitriaman Fitriaman. "Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pendapatan Pajak Daerah (Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari)." *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* 8.2 (2023): 208-217.
- Hutagalung, Simon Sumanjoyo, Alvindra Alvindra, and Dedy Hermawan. "Trend Realisasi Pajak Daerah: Forecasting Analysis." *AFRE (Accounting and Financial Review)* 6.1 (2023): 77-85.
- (Nico Andrianto, 2007),. "Standar akuntansi pemerintahan dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah." *JKAP (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik)* 17.1 (2013): 29-45.

(R. Adisasmita, 2011). Hamid (2007 *Praktik Penerapan Transparansi dan Akuntabilitas Untuk Kepercayaan Publik Atas Pengungkapan Laporan Keuangan (Studi Kasus di Kota Kupang)*). Diss. 2019.

Suryono, B. (n.d.). PENGARUH AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGANDAERAH. 2(Marihot P. Siahaan, 2006)

Wulandari, Phaureula Artha, and Emy Iryanie. "Analisis pengaruh kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Banjarmasin." *Seminar Nasional Indocompac*. Bakrie University, 2016.

JURNAL

Hadisantoso, Erwin, and Fitriaman Fitriaman. "Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pendapatan Pajak Daerah (Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari)." *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* 8.2 (2023): 208-217.

Lubis, Asep Ridwan, and Dinda Dinanti. "Penerapan Pajak Penghasilan Badan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan Harmonisasi Perpajakan." *Journal of Financial Economics & Investment* 2.3 (2022): 135-143.

Laksono, B. B., & Subowo, S. (2014). Pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dan dak terhadap belanja daerah. *Accounting Analysis Journal*, 3(4).

Lubis, Asep Ridwan, and Dinda Dinanti. "Penerapan Pajak Penghasilan Badan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan Harmonisasi Perpajakan." *Journal of Financial Economics & Investment* 2.3 (2022): 135-143.

Munir, Ahmad, and Dea Arifka Andini

Nurizzkiana, B. dan Handayani, L. dan Widiastuty, E. (2017). Determinan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Implikasinya Terhadap Kepercayaan Public-Stakeholder. *journal*

Munir, Ahmad, and Dea Arifka Andini. "Pengaturan Pajak Restoran atas Food Truck Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Tranparansi akuntabilitas *MIMBAR YUSTITIA: Jurnal* 1.1 (2017): 92-105.

Ridzal, N. A. (2020). Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (Bpkad) Kabupaten Buton. *Financial: Jurnal Akuntansi*, 6(1), 87–97. <https://doi.org/10.37403/financial.v6i1.135>

UNDANG-UNDANG

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang Undang no 58 (2008), Pengelolaan pajak daerah
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Hutagalung, Simon Sumanjoyo, Alvindra Alvindra, and Dedy Hermawan. "Trend Realisasi Pajak Daerah: Forecasting Analysis." *AFRE (Accounting and Financial Review)* 6.1 (2023): 77-85.

Tarigan, Erwinton Putra Antonius, and Lastria Nurtanzila. "Standar akuntansi pemerintahan dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah." *JKAP (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik)* 17.1 (2013): 29-45.

. "Pengaturan Pajak Restoran atas Food Truck Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Tranparansi akuntabilitas *MIMBAR YUSTITIA: Jurnal* 1.1 (2017): 92-105.



**UPT. PERPUSTAKAAN PUSAT
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA KUPANG**

Nomor Pokok Perpustakaan: 5371002D2020114
Jl. Prof Dr. Herman Johanes, Penfui Timur, Kupang Tengah, Kab. Kupang.
Website: <https://perpustakaan.unwira.com/> e-mail: lib.unwira@gmail.com

SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI

Nomor: 1248/WM.H16/SK.CP/2025

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Ajeng Victoria Kotetari
NIM : 33120079
Fakultas/Prodi : Ekonomika dan Bisnis/Akuntansi
Dosen Pembimbing : 1. Rere Paulina Bibiana, SE.,M.Si
2. Alfonsus R. Suninono, SE.,M.Ak
Judul Skripsi : **ANALISIS TRANSPARASI DAN AKUNTABILITAS
DALAM PENGELOLAAN PAJAK DAERAH
(Studi Kasus Pada BAPENDA Kota Kupang)**

Skripsi yang bersangkutan di atas telah melalui proses cek plagiasi menggunakan Turnitin dengan hasil kemiripan (*similarity*) sebesar **11 (Sebelas) %**.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kupang, 11 September 2025

Kepala UPT Perpustakaan,



Silvester Suhendra, S.Ptk.